

Judul : Maskapai, Tidak Usah Lagi Ambil Orang Asing: Anak Papua Punya Lisensi Pilot
Tanggal : Jumat, 03 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Anak Papua Punya Lisensi Pilot Maskapai, Tidak Usah Lagi Ambil Orang Asing



Robert J Kardinal

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal meminta Pemerintah menghentikan penggunaan pilot-pilot asing untuk rute penerbangan Papua. Hal ini menyusul adanya peristiwa penyanderaan terhadap pilot maskapai Susi Air Captain Philips Max Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKKB) Papua.

"Sebaiknya Pemerintah membuat satu kebijakan yang lebih memihak kepada pilot-pilot Orang Asli Papua (OAP). Karena sekarang maskapai yang melayani rute penerbangan Papua seperti Susi Air mempekerjakan hampir 100 persen pilot asing," kata Robert, kemarin.

Robert menegaskan terjadinya penyanderaan terhadap pilot Susi Air dan berharap pilot asal Selandia Baru ini dapat segera dibebaskan. Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran pentingnya mengandalkan anak bangsa untuk pekerjaan tersebut. Anak-anak Papua pun sudah banyak yang mampu.

Bekas Ketua Fraksi Golkar ini bilang, banyak anak Papua yang sudah mengantongi lisensi pilot setelah mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah penerbangan di tanah air. Namun setelah baik, mereka justru tidak diberdayakan.

"Jadi sudah sekolah tinggi-tinggi, dibiayai oleh Pemerintah Daerah di Papua, malah tidak dipekerjakan.

Hak kerja mereka diberikan kepada orang-orang asing. Akhirnya kan semua orang bahkan seluruh dunia menjadi repot (karena adanya penyanderaan pilot Susi Air oleh KKKB)," ujarnya.

Robert menuturkan, Pemerintah Papua melalui dana Otonomi Khusus telah menyejahterakan banyak anak-anak Papua untuk menjalani pendidikan penerbangan. Mereka ini berasal dari berbagai daerah di Papua seperti Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Merauke, Jayapura dan berbagai daerah lainnya.

Adapun biaya yang dikeluarkan sangat besar, antara Rp 700 juta hingga Rp 900 juta per orangnya. Bahkan di Papua, saat ini ada sudah berdiri Sekolah Penerbangan yang dirintis oleh Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

"Mereka ada yang pilot, ada juga yang mekanik. Nah ini harus ada kebijakan yang membuka pintu seluas-luasnya kepada OAP saja. Tidak usah lagi ambil (pilot/mekanik) dari orang asing," tegasnya.

Dia berharap Kementerian Tenaga Kerja, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan duduk bersama membahas masalah pilot asing di Papua. Yang terjadi saat ini, semua maskapai yang melayani rute penerbangan di Papua, hampir seluruh pilotnya adalah orang asing.

"Saya yakin memilih maskapai seperti Ibu Susi (Susi Pudjiasastuti) mendukung anak Papua jadi pilot di maskapai miliknya Susi Air. Ibu Susi akan mengerti karena beliau sangat cinta NKRI," tuturnya.

Robert menegaskan, plus minus mempekerjakan orang asing sebagai pilot di Papua. Selain persoalan latar belakang, bukan hal yang mustahil pilot asing yang bekerja di Papua merupakan agen intelijen asing yang disusupkan ke Indonesia. Dan yang pasti, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti sangat besar.

Belum lagi biaya dokumen kerja di Indonesia seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Dahsukim yang merupakan dokumen Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian untuk tenaga kerja asing. Belum lagi biaya penginapan/rumah dan termasuk biaya kepulangan ke negara asal.

"Jadi pasti akan sangat mahal. Sementara kalau anak Papua, tidak perlu semua itu. Upah pasti lebih murah. Dia juga sudah punya rumah menetap. Dokumen juga nggak ribet. Jadi kenapa mesti diberikan kepada orang asing," katanya.

Dan yang lebih utama, jelas Robert, peristiwa penyanderaan yang dialami Pilot Susi Air tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Apalagi, saat ini ada indikasi jika KKKB di Papua menasar warga asing yang bekerja di sana. Ini salah satu strategi KKKB untuk mendapat perhatian internasional.

"Kalau pilotnya OAP tidak mungkin mereka mau menyandera karena saudaranya sendiri. Kalau orang asing, bisa jadi berita internasional. Akibatnya negara rugi besar dan Papua menjadi perhatian dunia internasional."

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga mendorong para kepala daerah di Papua membuat kebijakan keras agar anak-anak yang sudah memiliki lisensi pilot untuk dapat diterima pada semua perusahaan-perusahaan penerbangan yang melayani rute Papua.

"Maskapai seperti Batik Air, Lion Air dan lainnya bisa mempekerjakan anak-anak kita. Baik pilot, mekanik bahkan juga pramugari/pramugaranya," pungkasnya. ■ KAL